

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilihat dari latar belakang historisnya, Austria adalah salah satu negara di Eropa yang memiliki beragam agama dan sangat menjaga toleransi diantara kemajemukan yang ada didalamnya. Kemajemukan itu dijamin dengan lahirnya Grundrechtspatent (UU Hak-Hak Dasar) tahun 1849, tahun di mana kementerian "Urusan Agama dan Pendidikan" pertama kali didirikan, konsep tersebut diabadikan dalam Undang-Undang Konstitusi Federal tanggal 21 Desember 1867 tentang hak-hak umum warga. Salah satu ketentuan hukum tata negara adalah bahwa setiap gereja dan masyarakat beragama yang diakui secara hukum memiliki hak-hak dasar tertentu. Namun, tidak dijelaskan secara tepat bagaimana pengakuan hukum tersebut dapat diperoleh sampai sebuah undang-undang disahkan pada tahun 1874. Ordonansi pertama berdasarkan Undang-Undang Pengakuan ini dibuat pada tahun 1877, untuk Gereja Katolik Lama (Austrian Federal Chancellery, 2021).

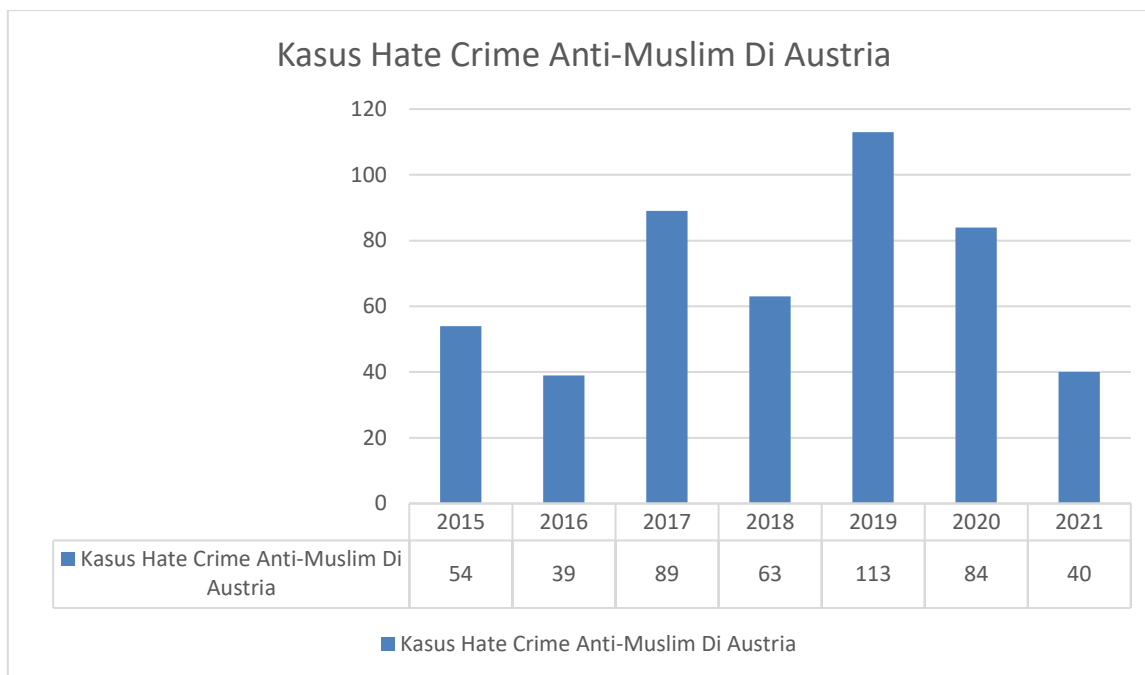
Sebelum tahun 1890, komunitas agama Yahudi didasarkan pada berbagai undang-undang, yang perbedaannya diselaraskan dengan peraturan seragam yang terkandung dalam Hukum Israel tahun 1890, yang berlaku di seluruh Austria. Setelah pendudukan dan aneksasi Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1878 dan 1908, sejumlah besar Muslim mulai tinggal di wilayah monarki untuk pertama kalinya, dan pada tahun 1912 ini menyebabkan pengakuan resmi agama Islam (menurut sekolah Hanafi). Karena masuknya pekerja migran dari bekas Yugoslavia dan Turki, jumlah Muslim meningkat tajam selama dekade terakhir abad ke-20, dan mereka juga tunduk pada Hukum Islam, yang dengan demikian diperluas ke ritual lain pada tahun 1988 (Federal Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1988). Selain pengikut Islam, banyak orang lain dari berbagai denominasi agama menetap di Austria selama abad ke-20. Mereka mencari pengakuan resmi atas agama mereka masing-masing, dan ini dicapai terutama berdasarkan Undang-Undang Pengakuan tahun 1874 (Austrian Federal Chancellery, 2021).

Keramahan Austria terhadap kemajemukan umat beragama terbukti tetap baik meskipun terdapat peristiwa 9/11 di Amerika Serikat yang memojokkan umat Islam dan membangkitkan Islamophobia. Dampak 9/11 sangat minim. Hal ini dibuktikan dengan mengacu pada Laporan European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) dimana puncak dari 75 laporan yang ditargetkan secara lokal, lima dari setiap negara anggota UE yang melacak dengan cermat tanggapan terhadap Muslim dan setiap perubahan dalam sikap anti Muslim setelah serangan 9/11. Lima belas laporan pertama diperintahkan dalam waktu 24 jam setelah serangan, menetapkan kerangka kerja yang diperlukan untuk memantau dengan cermat kondisi yang dihadapi oleh umat Islam di setiap negara anggota UE. Proyek ini berakhir pada akhir tahun 2001. Respon yang cepat menunjukkan bahwa ada harapan, bahwa reaksi seperti itu akan terjadi, karena hanya ada sedikit, jika ada, bukti nyata dari perubahan apa pun. dalam sikap atau reaksi anti-Muslim di awal pelaksanaan proyek (Allen & Nielsen, 2001). Laporan tersebut mencatat pengakuan yang hampir tak dapat diprediksikan bahwa respons pencegahan yang jelas dan tegas diperlukan dalam mengenali respons dari berbagai presiden dan perdana menteri Eropa yang segera mengambil tindakan untuk menekankan bahwa baik "Islam" maupun "Muslim" sendiri tidak melakukan serangan itu (Allen & Nielsen, 2001). Sayangnya, penilaian ringkasan menemukan bahwa "Muslim menjadi korban tanpa pandang bulu dari peningkatan serangan verbal dan fisik setelah peristiwa 11 September," meskipun ada upaya yang dilakukan oleh beberapa elit politik Eropa untuk meredakan situasi (Allen & Nielsen, 2001). Menurut kesimpulannya, dinamika baru yang dibawa oleh peristiwa 9/11 menyebabkan sentimen anti-Muslim dan anti-Islam menjadi lebih ekstrem, terbuka, dan diterima secara luas.

Di Austria sendiri setelah terjadinya 9/11 serangan fisik dengan kekerasan sangat jarang terjadi meskipun wanita Muslim yang mengenakan jilbab adalah target yang dapat diidentifikasi untuk pelecehan verbal. Pria Sikh yang mengenakan sorban dikira Muslim dan secara tidak sengaja juga menjadi sasaran meskipun insiden ini juga terbatas. Tidak ada perubahan signifikan dalam sikap yang dicatat meskipun National Focal Point (NFP) merasa bahwa beberapa perasaan xenofobia dan Islamofobia yang sudah ada sebelumnya dan yang kemudian dibangkitkan kembali pada 11 September, yang keduanya tampaknya cukup meluas. Dirasakan bahwa peningkatan tajam dalam kecurigaan segera setelah peristiwa menyebabkan gelombang prasangka awal sebelum situasi kembali normal dengan cepat. Salah satu penjelasan atas kurangnya permusuhan yang sedang berlangsung

adalah bahwa Islam memiliki status hukum sebagai komunitas agama yang diakui. Tidak ada ukuran langsung reaksi yang dicatat dalam laporan meskipun sejumlah pengamatan memberikan wawasan. Sejumlah jajak pendapat dilakukan meskipun tidak ada yang membahas isu-isu Islamofobia. Namun, beberapa hasil menunjukkan di mana istilah seperti 'orang asing' dan 'Islamisme' sebagian besar tidak populer, sementara yang lain menunjukkan bahwa sepuluh persen dari populasi secara terbuka xenofobia. Yang lain menunjukkan bagaimana 'pekerja migrant' dan 'orang asing' dianggap di antara orang-orang yang paling tidak penting di Austria. Pada saat yang sama, Austria mengalami 'serangan informasi' di mana minat terhadap Islam menjadi jauh lebih umum di sebagian besar masyarakat umum. Tanggapan media terhadap peristiwa adalah salah satu yang diidentifikasi oleh NFP sebagai yang paling sederhana (Allen & Nielsen, 2001).

Namun demikian justru terjadi lonjakan islamophobia yang sangat drastis dengan adanya kasus Hate Crime anti-muslim. Islamophobia sendiri menurut (United Nations, 2021) didefinisikan sebagai ketakutan, prasangka, dan kebencian terhadap umat Islam yang mengarah pada provokasi, permusuhan, dan intoleransi dengan cara mengancam, melecehkan, menghasut, dan mengintimidasi umat Islam dan non-Muslim, baik di dunia online maupun offline. Dimotivasi oleh permusuhan institusional, ideologis, politik dan agama yang melampaui rasisme struktural dan budaya, ia menargetkan simbol dan penanda menjadi seorang Muslim. Sedangkan Hate Crime sendiri didefinisikan sebagai pelanggaran di mana korban menjadi sasaran karena ras, warna kulit, agama, kecacatan, orientasi seksual, atau asal negara dari korban yang sebenarnya atau yang dirasakan. Definisi ini didasarkan pada undang-undang Federal yang mendefinisikan kejahatan rasial sebagai pelanggaran "yang memanifestasikan bukti prasangka berdasarkan ras, agama, kecacatan, orientasi seksual, atau etnis" (Sullaway, 2004). Mengacu pada definisi islamophobia dan hate crime, penulis dapat melihat hubungan antara keduanya, dimana islamofobia adalah sebuah prasangka dan merupakan bentuk umumnya, sedangkan hate crime adalah istilah kolektif untuk berbagai kejahatan mulai dari vandalisme hingga penyerangan fisik dan pembunuhan, yang semuanya memiliki hubungan kuat yang sama dengan prasangka. Sedangkan contoh dari hate crime anti muslim yang terjadi di Austria sendiri dapat berupa kejahatan kekerasan verbal, non-verbal, ancaman, perusakan property, dan vandalism. Adapun lonjakan Hate Crime itu dapat dilihat pada gambar I.A.1



Gambar I. A.1 Diagram statistik hate crime anti-muslim 2015-2021

Sumber : (ODIHR, 2021)

Pada Gambar I.A.1 yang menampilkan diagram statistik kejahatan kebencian (Hate Crime) di Austria pada periode 2015 sampai dengan 2021, dimana data diperoleh dari situs resmi OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). Dilihat dari Gambar I.A.1 penulis dapat melihat statistik Hate Crime anti-muslim di Austria dari periode 2015 yang terus naik sampai dengan periode 2021, dimana puncak kenaikan pada tahun 2019 dengan jumlah total 113 kasus. Dan kasus ini diperkuat dengan adanya Sikap rasis terhadap Muslim di Austria yang dilaporkan telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2019 menurut organisasi hak asasi manusia Austria SOS Mitmensch. Dalam konferensi video, juru bicara SOS Mitmensch Alexander Pollak menyatakan bahwa pidato dan advokasi anti-Muslim oleh partai politik dan individu berada pada titik tertinggi sepanjang masa (Laveda, 2021). Lebih detailnya, penulis akan menjelaskannya dalam pembahasan tentang hate crime di Austria.

Tapi sebenarnya insiden pertama yang membawa perubahan luas pada hubungan antara Muslim dan Austria terjadi pada musim gugur 2004. Majalah mingguan News melaporkan bahwa dua sekolah Muslim swasta di Wina menggunakan buku-buku yang dapat memicu kebencian di kalangan Muslim terhadap “orang-orang kafir yang tinggal di lingkungan mereka. ”. Sampai saat itu, orang Austria belajar tentang ekstremisme Islam

hanya melalui laporan media tentang kejadian yang terjadi di luar negeri, misalnya pembunuhan van Gogh di Belanda, aksi teroris yang dilakukan oleh umat Islam, dan kejadian serupa. “Eksternalisasi” dari kejadian-kejadian ini dan anggapan bahwa hal itu menjadi perhatian negara lain memperkuat keyakinan banyak orang Austria bahwa masyarakat mereka sendiri menikmati status luar biasa dan tidak tersentuh oleh radikalisme semacam itu (Hödl, 2010).

Pada umumnya, Muslim Austria berbagi pandangan ini dan dengan tegas menunjukkan bahwa mereka menikmati posisi yang relatif menguntungkan. Omar Al-Rawi, seorang anggota Partai Sosial Demokratik Wina yang bertanggung jawab atas masalah integrasi di kota, berpikir bahwa konstelasi yang berbeda ini menyumbang iklim toleransi umum termasuk keengganan masyarakat untuk mendesak perempuan Muslim untuk melepas jilbab. Penemuan buku sekolah, bagaimanapun, mengungkapkan bahwa di bawah permukaan hubungan yang sangat harmonis, situasinya jauh lebih kompleks dan beragam, hampir tidak memungkinkan untuk kesimpulan umum (Hödl, 2010).

Pada tahun 2006 Islamofobia kembali naik. Austria, yang pernah membayangkan dirinya sebagai sebuah pulau di tengah masyarakat Eropa lainnya yang diwarnai ketegangan antara Muslim dan non-Muslim, tidak bisa lagi mengisolasi diri dari peristiwa yang terjadi di luar negeri. Karikatur Islam yang dicetak di surat kabar Denmark memberikan contoh ilustrasi. Mereka bertindak sebagai provokasi di seluruh dunia Islam dan mempengaruhi Muslim Austria juga. Beberapa Muslim bahkan turun ke jalan dan melakukan demonstrasi menentang mereka. Dengan cara ini, Austria tidak bisa lagi melihat dirinya terputus dari dunia yang lebih luas. Kejadian di luar negeri berdampak di negaranya sendiri (Hödl, 2010).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang bagaimana Islamophobia berkembang baik di Dunia, Eropa, maupun di Austria, maka tulisan ini membahas tentang apa faktor yang menyebabkan peningkatan Islamofobia di Austria sejak tahun 2015 hingga 2021?

C. Kerangka Konseptual

Tumbuhnya Islamofobia di dunia tidak lepas dari pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingannya, entah itu untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam hal ini kelompok yang biasa memainkan isu tertentu untuk mencapai kepentingannya, terutama dalam kepentingan politiknya adalah para penganut Populisme. Islamophobia sendiri menurut (United Nations, 2021) didefinisikan sebagai ketakutan, prasangka, dan kebencian terhadap umat Islam yang mengarah pada provokasi, permusuhan, dan intoleransi dengan cara mengancam, melecehkan, menghasut, dan mengintimidasi umat Islam dan non-Muslim, baik di dunia online maupun offline. Dimotivasi oleh permusuhan institusional, ideologis, politik dan agama yang melampaui rasisme struktural dan budaya, ia menargetkan simbol dan penanda menjadi seorang Muslim.

Sedangkan definisi dari populisme sendiri mempunyai banyak makna. Menariknya, bahkan beberapa karya populisme dianggap sebagai terobosan dan substansial seperti Ionescu dan Gellner (Ghita & Ernest, 1969) gagal menyatakan secara eksplisit apa yang mereka maksud dengan istilah tersebut. Demikian pula Populisme karya Margaret Canovan (Canovan, 1981) muncul dengan tipologi populisme yang pada dasarnya terdiri dari dua kategori, yaitu populisme agraris dan populisme politik. Mereka dibagi lagi menjadi total tujuh jenis populisme yang berbeda – namun, kesamaan yang mereka miliki diserahkan kepada pembaca untuk direnungkan. Meskipun Taggart menyebut karya Canovan sebagai "upaya paling ambisius untuk mengatasi populisme" (Taggart, 2000), ia juga menunjukkan fakta bahwa itu tidak menyarankan inti umum apa pun pada fenomena populisme atas dasar luas berbagai fenomena yang tercakup di dalamnya. Lutz (Lutz, 1982) juga menyuarakan kritik bahwa buku itu memasukkan kasus-kasus populisme dengan agak tidak kritis.

Demikian pula, definisi Wiles (Wiles, 1969), yang mencantumkan dua puluh empat karakteristik populisme, tidak terlalu membantu untuk mengidentifikasi kasus populisme karena penerapan empirisnya yang terbatas. Berlin et al. (Berlin et al., 1968) menunjukkan sedikit lebih menahan diri dengan memberikan definisi yang terdiri dari enam fitur, termasuk kepentingan rakyat (*Gemeinschaft*) dan penolakan politik, yaitu kembali ke

kondisi alam masyarakat sebelum pengenalan apapun sistem politik. Para penulis ini juga menyarankan bahwa modernisasi menghasilkan populisme. Namun, kontribusi multifaset ini tidak banyak membantu dalam menganalisis fenomena populisme. Mereka dapat memberi kita intuisi tentang apa itu populisme, tetapi tidak memberikan pemahaman sistematis tentang esensinya.

Pendekatan yang lebih baik adalah pendekatan Mény dan Surel (Mény & Surel, 2002). Mereka mengurangi jumlah karakteristik inti populisme menjadi tiga yang mereka klaim sebagai aspek esensialnya. Pertama, 'rakyat' adalah yang terpenting. Di sini, perasaan komunitas ditekankan, dan belahan horizontal (seperti kiri-kanan) dikecilkan sementara yang vertikal diperbesar untuk tujuan mengecualikan kelompok tertentu, mis. elit dan pendatang. Kedua, populis mengklaim bahwa 'rakyat' telah dikhianati oleh elit melalui penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dll. Ketiga, populis menuntut bahwa "keutamaan rakyat" harus dipulihkan. Singkatnya: elit saat ini harus diganti dan di tempat mereka para pemimpin baru (kaum populis) akan bertindak untuk kebaikan 'rakyat'.

Taggart (Taggart, 2000) setuju dengan dua dari tiga poin ini. Dia setuju dengan pentingnya 'rakyat', karena populis cenderung mengidentifikasi dengan hati yang mewakili konsepsi ideal komunitas tempat mereka berasal. Entitas imajiner ini adalah 'rakyat'. Kedua, antagonisme terhadap 'orang lain' yang dikonstruksi adalah sentral, yang juga disoroti oleh Panizza (Panizza, 2005), yang mengacu pada dimensi anti status quo populisme. Selain itu, bagi Taggart, fitur utama populisme adalah permusuhannya terhadap politik perwakilan, yang dipandang sebagai cara mencuri kekuasaan dari 'rakyat'. Selain itu, Taggart menunjukkan perlunya "rasa krisis yang ekstrem" (Taggart, 2002) agar populisme muncul.

Terakhir, menurut penulis, Mudde (Mudde, 2004) memberikan definisi yang paling sederhana dengan membatasi dirinya pada 'rakyat' dan antagonisnya terhadap 'orang lain'. Ia memandang populisme sebagai ideologi yang menganggap masyarakat pada akhirnya dipisahkan menjadi dua homogen dan kelompok antagonis, 'rakyat murni' versus 'elit korup', dan yang berpendapat bahwa politik harus menjadi ekspresi *volonté générale* (kehendak umum) rakyat.

Singkatnya, definisi ini menunjukkan kepada kita bahwa aspek inti populisme adalah, pertama, fokus pada 'rakyat' - apa pun istilah ini merujuk pada - dan kedaulatannya, dan kedua, antagonisme antara 'rakyat' ini dan 'rakyatnya'. yang lain' – apapun 'yang lain' ini,

elit dalam demokrasi perwakilan, orang asing, atau lainnya. Namun demikian, tampaknya setidaknya mengenai dua poin definisi ini, ada bukti yang mendukung konsensus akademis, jadi penulis akan menggunakan definisi Mudde sebagai definisi kerja populisme untuk saat ini.

Definisi yang dibawakan Mudde ini adalah definisi dari populisme secara umum, Jagers (Jagers, 2006) mengkategorikan definisi dari populisme menjadi tiga kategori: Pertama, populisme sebagai bentuk organisasi, dimana dalam kajian politik Amerika Latin, populisme sering dikaitkan dengan mobilisasi kelompok sosial yang heterogen oleh seorang pemimpin yang kuat (Jansen, 2011). Kedua, populisme sebagai gaya politik, yang mana menurut Weyland (Weyland, 2001) populisme “sebagai strategi politik di mana seorang pemimpin personalistik mencari atau menjalankan kekuasaan pemerintah berdasarkan dukungan langsung, tidak termediasi, dan tidak terlembagakan dari sejumlah besar pengikut yang sebagian besar tidak terorganisir”. Alih-alih menganut ideologi politik tertentu, atau perbedaan kanan dan kiri, para pemimpin populis bersikap pragmatis dan oportunistik dalam pencarian mereka untuk menaklukkan dan mempertahankan kekuasaan. Dan terakhir populisme sebagai ideologi, dimana populisme dapat dikonseptualisasikan sebagai ideologi tipis terpusat yang mengacu pada citra demokrasi redemptive (Canovan, 2002).

Mengacu pada definisi (Mudde, 2007) yang cukup spesifik untuk memberikan pedoman yang jelas untuk menentukan apakah suatu partai politik itu termasuk dalam politik populisme atau tidak. Ambang batasnya agak tinggi karena partai populis harus mempertimbangkan (1) rakyat sebagai entitas yang homogen dan murni, (2) elit sebagai entitas yang homogen dan korup, (3) rakyat dan elit sebagai dua kelompok yang bermusuhan, dan (4) menyukai langkah-langkah untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat (misalnya demokrasi langsung). Mudde menggunakan definisinya untuk mengidentifikasi sejumlah besar partai populis di seluruh Eropa Barat dan Timur.

D. Hipotesis

Terjadinya trend peningkatan Islamofobia di Austria disebabkan oleh adanya politik populisme yang dilakukan oleh mantan kanselir Austria Sebastian Kurz.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Menginformasikan tentang penyebab dari peningkatan islamofobia di Austria.
2. Menyuguhkan data-data terkait hate crime anti-muslim di Austria selama periode 2015-2017.
3. Menginformasikan data-data terkait hate crime anti-muslim di Austria selama periode 2017-2019.
4. Menginformasikan data-data terkait hate crime anti-muslim di Austria periode 2019-2021.
5. Menganalisa data hate crime anti-muslim di Austria dan mengimplikasinya dalam indikasi politik populisme di Austria.
6. Menjawab pertanyaan atas penyebab meningkatnya islamofobia di Austria.

F. Batasan Penelitian

Penelitian “Peningkatan Islamofobia Di Austria” akan berfokus pada rentang waktu antara tahun 2015 periode sebelum Sebastian Kurz menjabat sebagai kanselir Austria, Kemudian periode tahun 2017, dimana pada tahun ini juga Sebastian Kurz menjabat sebagai kanselir Austria sampai dengan 2019, kemudian pada tahun 2020 sampai dengan 2021 dimana Kurz menjabat sebagai kanselir untuk periode keduanya.

G. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Jenis data yang diperlukan adalah data terkait dengan statement, kegiatan-kegiatan, dan keputusan-keputusan dari Sebastian Kurz beserta dengan koalisi partainya yang mengindikasikan adanya politik populisme dan juga data terkait hate crime anti-muslim di

Austria. Adapun metode pencarian data penulis menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu, penelusuran data-data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis yang berasal dari buku, beberapa dokumen, media masa, internet serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik deskriptif atau eksplanasi terkait data-data yang telah diperoleh.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesis, tujuan penelitian, batasan penelitian, metode, dan sistematika penulisan.

Bab II Pembahasan

A. Fenomena Islamofobia di Austria

Pada sub-bab ini menjelaskan tentang data hate crime anti-muslim di Austria selama periode 2015 sampai 2017, selama periode 2017 sampai dengan 2019, dan selama periode 2019 sampai dengan 2021.

B. Populisme Di Eropa

Pada sub-bab ini menjelaskan tentang politik populisme di Eropa.

C. Populisme Sebastian Kurz Dalam Peningkatan Islamofobia Di Austria

Pada sub-bab ini menjelaskan tentang hubungan politik populisme dengan mantan kanselir Austria Sebastian Kurz yang menyebabkan meningkatnya Islamofobia di Austria.

Bab III Kesimpulan

Setelah penjelasan pada bab sebelumnya, bab ini akan memberikan kesimpulan dari pembahasan di penelitian ini.